

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN
PADA ANAK DALAM PERATURAN BUPATI KULONPROGO
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK**

SKRIPSI

Oleh :

**Mohammad Ainun Najib
NIM. C91215067**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Subaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Ainun Najib

NIM : C91215067

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam


Judul anSkripsi : Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan
Pada Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo
Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan
Perkawinan Pada Usia Anak

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Juli 2019



menyatakan,


Mohammad Ainun Najib
NIM. C91215067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ainun Najib NIM.C91215067 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 Juli 2019

Pembimbing,



A.Kemal Reza, S.Ag.,MA.

NIP.1975070120050118

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ainun Najib NIM. C91215067 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



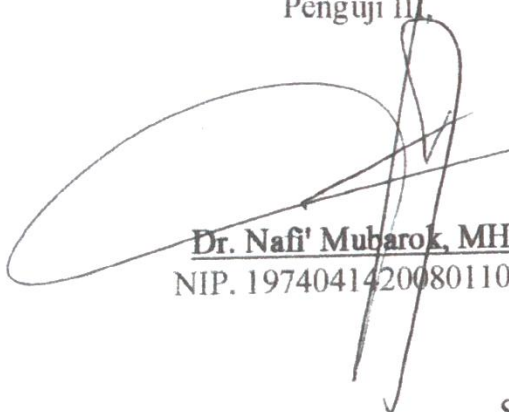
Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji II,



Dr. Muwahid, SH, M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III,



Dr. Nafi' Mubarak, MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, MHI.
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 25 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Ainun Najib
NIM : C91215067
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : najib41nun@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN PADA ANAK
DALAM PERATURAN BUPATI KULONPROGO NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019
Penulis

(Mohammad Ainun Najib)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Pada Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak”. Ini merupakan hasil penelitian pustaka guna menjawab pertanyaan; 1) Bagaimanakah Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 mengatur mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak ?, dan 2) Bagaimanakah Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak ditinjau dari peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku ?

Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka, kajian teks (*text reading*), dan wawancara kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, skripsi ini merupakan penelitian analisis Yuridis dengan pendekatan Undang-Undang dan dihubungkan dengan Peraturan terkait, dalam hal ini mencari tahu kesesuaiannya PerBup Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di dalam skripsi ini memuat dua hasil penelitian. Pertama, bahwa upaya pencegahan perkawinan pada usia anak berdasarkan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 adalah dengan cara edukatif atau memberi pemahaman tentang kerugian pernikahan pada usia anak dan memaksimalkan peran masyarakat dalam melaksanakan pengaduan yang akan ditindak lanjuti oleh beberapa lembaga yang terkait. Kedua, bahwa Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tidak dapat diperbandingkan dengan UUP dan KHI sebab Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 ini merupakan aturan pendelegasian dari aturan yang berada di atasnya sehingga aturan-aturan yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tidak memiliki implikasi hukum dan hanya bersifat sebagai imbauan pencegahan saja. Sehingga Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 memberikan pengaturan yang berimplikasi pada sosiologis sedangkan pengaturan KHI dan UUP memberikan implikasi yuridis bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan cita-cita dari adanya Peraturan Bupati ini maka perlu adanya sosialisasi yang lebih dan dilakukan secara terus menerus untuk mencapai hasil yang lebih baik, karena sebegus apapun cita-cita yang ingin dicapai jika program yang dibuat masih banyak masyarakat yang tidak tau maka akan sia-sia. Serta perlu adanya kesadaran pribadi pada masyarakatnya.

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16

A. Tinjauan Umum tentang Anak.....	19
1. Definisi Anak dalam Perundangan	19
2. Hak dan Kewajiban Anak	22
B. Tinjauan Perkawinan Anak di Indonesia	27
1. Batas Perkawinan Menurut Hukum Perdata di Indonesia.....	27
2. Alasan Dispensasi Perkawinan Pada Anak.....	29
3. Tujuan Adanya Penentuan Batas Usia Perkawinan	33

A. Gambaran Umum Kabupaten Kulonprogo	37
B. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.	41
C. Pelaksanaan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.....	51

A. Pengaturan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada usia Anak..... 57

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain dan telah menjadi sunatullah manusia hidup bermasyarakat. Termasuk didalam bernegara yang paling nampak bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain adalah adanya kebutuhan menikah dan berkeluarga. Keluarga merupakan unit terkecil yang ada dalam sekelompok masyarakat yang terbentuk dari hubungan antar laki- laki dan perempuan yang diawali dari sebuah pernikahan dan melahirkan keturunan dan menjadi tanggung jawab besar, oleh karenanya menimbulkan pertanggung jawaban¹.

Berbicara mengenai pernikahan atau perkawinan, Indonesia termasuk merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Adanya berbagai macam produk kodifikasi hukum membuat Indonesia memiliki sumber hukum yang begitu beragam. Keberagaman ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum dan menyeimbangkan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat².

Hukum tidak terlepas dari lingkungan zaman dimana hukum tersebut lahir karena dia harus menjawab permasalahan hukum yang dihadapi atau mempermasalahkan suatu pendapat/pikiran tentang hukum yang dominan pada

¹ Abu Ahmadi dkk, *Psikologi Sosial, Cet Ke-2* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 239

² Zakiyuddin Baidhawry, *Reskontruksi Keadilan* (Salatiga: Stain Salatiga Press, 2007), 4

Salah satu produk hukum yang digunakan di Indonesia dan berkaitan dengan masalah keluarga di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini secara komprehensif membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan seperti dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dalam perkawinan, putusnya perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara anak dan orang tua, dan perwalian, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan serta ketentuan penutup⁴. Bab-bab yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga terdapat di dalam salah satu sumber hukum Islam, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³ *Ibid*, 4

Perkawinan sendiri merupakan wadah kehidupan persahabatan antara seorang suami sebagai kepala rumah tangga dengan istri dalam rangka menyempurnakan ketaatan kepada Allah SWT⁶. Dari perkawinan ini akan membentuk suatu lembaga terkecil yang disebut dengan keluarga. kemudian dari komunitas kecil antar keluarga akan menjadi bentukan yang lebih luas sehingga membentuk suatu negara. Setiap orang baik yang sudah maupun akan menikah sudah pasti mempunyai cita-cita dan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, yang mempunyai keturunan yang shalih shalihah karena itu merupakan salah satu tujuan dari perkawinan.

⁶ Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, (Yogyakarta Liberty, 1999), 8

⁶ Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, (Yogyakarta Liberty, 1999), 8

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dari definisi tentang perkawinan hampir sama yaitu sama-sama berdasarkan tujuan ketaatan kepada Tuhan. Dalam memberi batasan usia menikah antara Undang-undang perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sama dalam memberi batas usia menikah. dalam Undang-undang perkawinan disebutkan pada pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur ini seperti disebutkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 pada pasal 5 ayat (1) didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumahtangga perkawinan⁹ dan menambahkan pada ayat (2) yaitu bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur pada pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menunjukkan begitu pentingnya batas usia pada pernikahan sehingga Undang-undang sampai mengatur tentang usia minimal pernikahan.

⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam

Salah satu faktor dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 melihat dari beberapa tahun terakhir ini hasil Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi DIY, Kabupaten Kulonprogo tercatat sebagai daerah provinsi Yogyakarta dengan jumlah kasus pernikahan dini terbanyak. Data pengajuan dispensasi nikah dini dari pengadilan Agama Wates menunjukkan angka permohonan pengajuan dispensasi nikah tahun 2012 terdapat 170 pemohon. Sedangkan tahun 2013 sebanyak 169 pemohon. Sedangkan tahun 2014 sebanyak 152 pemohon, dan pada tahun 2015 sebanyak 116 pemohon. Dan angka ini sebagai statistik angka yang termasuk besar perkawinan pada usia anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁰ Fase Menimbang Peraturan Bupati Kulon Progo Nomer 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

“Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Pada Anak Dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak”

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui banyak permasalahan yang ditemukan. untuk itu permasalahan tersebut dapat di identifikasikan sebagai berikut :

- Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok masalah yaitu :

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 mengatur mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak ?
2. Bagaimanakah Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak ditinjau dari peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku ?

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian sebelumnya.

1. Penelitian pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Kesesuaiannya dengan Undang-undang Nomor

6 Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan dalam
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompila
n dengan penelitian yang dilakukan adalah sama
njawauan yuridis. sedangkan Perbedaan dengan pen
selain perbedaan wilayah yang diteliti adalah
nelisik tentang kerangka teori hubunganya den
elitian yang akan penulis dilakukan adalah mene
gali lebih dalam alasan faktor usia penetapan ba
n kompleks lagi mengenai dampak pada masyar
danya batasan usia menikah pada anak.
Pada tahun 2016 yang berjudul **“Dasar Perti**

- 6 Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan dalam
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompila
n dengan penelitian yang dilakukan adalah sama
njawauan yuridis. sedangkan Perbedaan dengan pen
selain perbedaan wilayah yang diteliti adalah
nelisik tentang kerangka teori hubunganya den
elitian yang akan penulis dilakukan adalah mene
gali lebih dalam alasan faktor usia penetapan ba
n kompleks lagi mengenai dampak pada masyar
danya batasan usia menikah pada anak.
Pada tahun 2016 yang berjudul **“Dasar Perti**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan batas usia perkawinan pada anak dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.
2. Untuk mengetahui analisis Yuridis terhadap batas usia perkawinan pada usia anak dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.

Sejalan dengan adanya tujuan diatas, diharapkan dari hasil literatur yang digunakan dapat memberi manfaat atau kegunaan hasil penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis.

- Kegunaan secara teoritis adalah manfaat penelitian yang berupa konsep-konsep, memerlukan pengembangan lebih lanjut, sebagai kegunaan tidak langsung.¹¹

- a. Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa studi Hukum Keluarga dan mengembangkan keilmuan yang diterima selama perkuliahan
- b. Dapat memberikan pemahaman, penyebarluasan sekaligus pengembangan hukum keluarga terutama pemahaman tentang perkawinan dan bagaimana menciptakan Idealisme berumah tangga yang mana pemahaman membangun rumah tangga yang baik di Indonesia ini masih sangat kurang.

2. Kegunaan secara praktis

Kegunaan secara praktis adalah manfaat dari penelitian yang tidak akan kita lakukan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Manfaat ini berhubungan erat dengan kegunaan suatu penelitian untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, baik secara jasmani ataupun rohani¹². Yaitu untuk:

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris khususnya yang berkaitan dengan perkawinan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Dapat dijadikan sebagai tambahan pemikiran bagi para pihak yang membutuhkan penelitian seputar perkawinan anak baik sekarang maupun masa yang akan datang.

¹² *Ibid.*, 159

G. Definisi operasional

1. Analisis Yuridis

Suatu penguraian mengenai suatu persoalan berdasarkan hukum dan Undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini adalah permasalahan yang terjadi pada Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

2. Definisi Perkawinan Usia Anak

Suatu pernikahan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang sudah di syaratkan oleh Undang-undang yang berlaku. Dalam hal adalah peraturan-peraturan terkait batas usia menikah terhadap Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Yaitu peraturan yang mengatur tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹³. Proses penelitian tersebut memperhatikan konteks studi dengan menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi.

¹³ Lexy, J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 290

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan skripsi, diantaranya :

- Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- InPres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut¹⁴.

Bahan hukum primer penelitian ini yaitu : Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Perkawinan

¹⁴ Tatang M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 132

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat Informasi atau data tersebut, yaitu literatur yang diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan penelitian¹⁵.sumber ini sebagai penunjang kelengkapan data. sumber hukum sekunder diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang relevan dengan masalah yang penulis bahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Adalah mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis¹⁶. metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung dan tidak langsung yang kaitannya dengan tema pembahasan. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah atas dokumen yang berupa Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, kemudian membaca dan menulis hasil kajian tersebut kedalam bentuk karya tulis (Skripsi).

b. wawancara

wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi tambahan untuk menunjang data yang dibutuhkan pada saat penelitian berlangsung

¹⁵ *Ibid.* 135

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Islam UI Press, 2010), 21

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan pengolahan data, dalam hal ini tahapan –tahapannya adalah sebagai berikut :

- ## 6. Teknik Penyajian Data

Teknik yang digunakan penulis dalam menuliskan skripsi ini antara lain:

¹⁹ *Ibid.*, 195

a. Analisis deskriptif

Yaitu suatu metode yang menggambarkan serta menjelaskan secara sistematis sehingga memperoleh data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam²⁰. Pada teknik penelitian ini, peneliti menggambarkan tentang adanya konsep pencegahan perkawinan pada usis anak pada Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 tahun 2016. Termasuk memberikan kajian lebih dalam terhadap definisi perkawinan pada anak dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016.

b. Pola Pikir deduktif

Yaitu Pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus²¹. Dalam hal ini penulis mengawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yaitu tentang perkawinan pada usia anak pada umumnya berdasarkan Undang-undang yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan hal yang bersifat khusus yaitu terkait definisi perkawinan pada usia anak dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.

²⁰ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Arkasa, 2009), 24

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset), 36

Untuk memudahkan penulis, maka dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub-sub, sehingga mudah dipahami oleh para pembaca, adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat suatu uraian latar belakang masalah. pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian; pendekatan, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Pada bab II ini memuat Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif Di Indonesia; yang berisikan Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Perkawinan Anak di Indonesia, Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Perdata di Indonesia, Alasan Dispensasi Perkawinan Pada Anak, Tujuan Adanya Penentuan Batas Usia Perkawinan.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan hasil penelitian tentang perkawinan anak. Pada bab III ini memuat Deskripsi Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang berisikan; Gambaran Umum

Kabupaten Kulonprogo, Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Pelaksanaan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Bab empat, pada bab ini memuat analisis terhadap data penelitian yang telah didekripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian kedalam pengetahuan yang sempurna. Pada bab ini memuat Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Pada Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; yang berisikan Pengaturan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada usia Anak, dan Analisis Yuridis Batas Usia Perkawinan Pada Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Bab kelima, merupakan bab penutup. dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Yaitu berisikan penutup : kesimpulan dan saran.

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

1. Definsi anak dalam perundangan

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Sedangkan Menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (Lima belas) tahun. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan, baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik dilapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.

adalah anak yang telah berumur 12 (Dua belas) tahun
umur 18 (Delapan belas) tahun yang diduga melakukan
Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1997
terjaan pasal 1 angka 20 “Anak adalah orang laki-laki atau
umur kurang dari 15 tahun”. Menurut Undang-undang No
7 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Ora
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan
masuk anak yang masih didalam kandungan”
ut Undang-undang Nomor 2008 Tentang Pornografi Pasa
adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas)
Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesej

adalah anak yang telah berumur 12 (Dua belas) tahun
umur 18 (Delapan belas) tahun yang diduga melakukan
Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1997
terjaan pasal 1 angka 20 “Anak adalah orang laki-laki atau
umur kurang dari 15 tahun”. Menurut Undang-undang No
7 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Ora
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan
masuk anak yang masih didalam kandungan”
ut Undang-undang Nomor 2008 Tentang Pornografi Pasa
adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas)
Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesej

1945, sehingga MK memutuskan batas usia anak yang bisa dimintai pertanggung jawaban hukum adalah 12 tahun.

Dalam Undang-undang di Indonesia sendiri beragam menyebut definisi anak dari segi batas usianya, namun paling banyak dalam Undang-undang menyebut definisi anak adalah umur 18 tahun, memang beberapa Undang-undang tidak secara langsung menyebut angka 18 namun hanya memberi batas minimal yang dimana dibawah usia 18 tahun semuanya sepakat bahwa disebut anak-anak.

Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa :

“selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjaadi dewasa, yaitu 18 tahun (delapan belas) tahun untuk wanita da 21 (duapuluh satu) tahun untuk laki-laki”.¹

Adapun Hilman Hadikusuma masih dalam buku yang sama merumuskannya dengan :

“menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2010), 32

namun ia telah dapat melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berhak kawin”²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang dalam proses pertumbuhan dan masih perlu penjagaan dari orangtua dan selama belum bisa memenuhi hak diri mereka sendiri maka disebut anak serta batasannya adalah masa umur yang disebut dalam banyak pasal di Undang-undang yang ada di Indonesia yaitu dibawah 18 tahun.

2. Hak dan kewajiban anak

a. Hak Anak Dalam Undang-undang

Hak anak sering diabaikan oleh para orang tua, tidak sedikit para orang tua lebih mementingkan keinginan-keinginan mereka terhadap anaknya bukan malah memenuhi keinginan anak, oleh karenanya banyak sekali anak yang mengalami gangguan psikis disebabkan keinginan atau tujuan mereka tidak tersalurkan dan akan tidak bisa membangun kreativitas. Inilah yang disebut kendala pada anak dalam mencapai sebuah tujuan, padahal tujuan tersebut dirasa sangat penting bagi anak, akan tetapi para orang tua tidak peka dengan keinginan anak.

Kaitannya dengan permasalahan ini, apabila individu tidak dapat mencapai tujuan dan tidak dapat mengerti secara baik mengapa tujuan itu tidak dapat dicapai, maka individu akan mengalami frustrasi atau kecewa, ini berarti bahwa frustrasi atau kecewa timbul karena adanya *blocking* dari

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, Bandung 2007), 77

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.⁴

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, sudah dijelaskan tentang hak-hak anak, yang meliputi :

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tubuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Berhak memperoleh suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

³ Herawati Mansur, *Psikologi Ibu Dan Anak Untuk Kebidanan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 14

⁴ Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* , (Malang: UIN Maliki Press,2008) , 302

- 3) Beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.
- 4) Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan orangtua asli tidak dapat menjamin tubuh kembang anak dan anak dalam keadaan terlantar.
- 5) Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.
- 6) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, termasuk anak yang menyandang cacat juga berhak mendapat pendidikan.
- 7) Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 8) Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya , bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

- 9) Bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 - 10) Berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penaghiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
 - 11) Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya.
 - 12) Bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif.
 - 13) Meskipun anak sudah mempunyai hak-haknya sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi kewajiban anak terhadap orangtua tetap tidak boleh dilupakan, tetap menghormati orangtua, dan orang-orang yang lebih tua dari mereka.
- b. Hak Anak Dalam Konvensi Hak Anak (*Convention of the Right of the Child*)

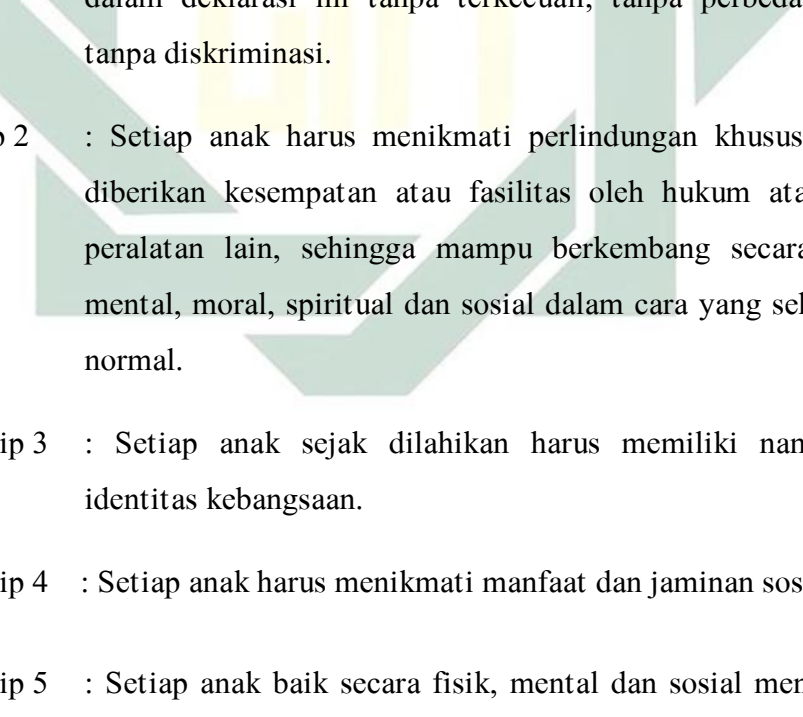
Konvensi hak anak ini disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada 2 september 1990.⁵ Konvensi anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak, dan merupakan sebuah perjanjian Internasional mengenai hak asasi manusia. Konvensi hak anak

⁵ Konvensi Media Advokasi Dan Penegakan Hak-Hak Anak, Volume III Nomor 3 Tahun 1999, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan

merupakan hasil konsultasi dan pembicaraan Negara-negara, dan lembaga PBB dan lebih dari 50 organisasi internasional.

Dalam substansi atau materi konvensi hak anak dideskripsikan secara rinci dan lengkap apa yang menjadi hak-hak anak. Negara anggota mempunyai kewajiban membuat laporan (*country report*) kepada UNICEF yang dilaksanakan setelah 2 (dua) tahun Negara yang bersangkutan meratifikasi konvensi hak anak, laporan rutin setelah hal itu dalam periode 5 tahun sekali.

Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut :⁶

- 
- Prinsip 1 : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan tanpa diskriminasi.
- Prinsip 2 : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan atau fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- Prinsip 3 : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- Prinsip 4 : Setiap anak harus menikmati manfaat dan jaminan sosial.
- Prinsip 5 : Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan

⁶ Abu Huraerah, *Chile Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2007), 32

Dalam kewajiban anak ini telah dijelaskan didalam pasal 19 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dimana kewajiban seorang anak adalah :

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlaq yang mulia

1. Batas usia perkawinan menurut hukum perdata di Indonesia

Dinegara Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Dalam

Penetapan hukum perkawinan Islam di Indonesia secara yuridis formal sudah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sejak 17 Agustus tahun 1945. Namun, pembaharuan baru dilaksanakan sejak di berlakukannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lahirnya UU No1 tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan babak baru dalam pengaturan hukum perkawinan yang benuasa Indonesia, Lahirnya Undang-undang tentang perkawinan tersebut merupakan kompromi dan kesepakatan wakil rakyat di DPR dan pemerintah yang tidak bertentangan dengan semua agama di

Dalam Undang-undang perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Selain itu, Undang-undang ini juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 Tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-undang perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.

ardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 60
 pasal 15, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Pasal 15, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Alasan dispensasi perkawinan pada anak

Dalam Undang-undang Negara telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Apabila ada yang melakukan perkawinan dibawah usia yang telah ditentukan maka harus melalui persidangan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan dan diputuskan oleh hakim.

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan, hakim wajib mencantumkan dasar ddalam setiap pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang bersifat *Voluntair*. Dengan kata lain, Undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.¹⁰

Permohonan dispensasi dapat dikabulkan oleh hakim dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) (2) Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) menjadi dasar

¹⁰ Sudikno Mertokusumo Dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 12

“perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

“dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita”.

Untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Selain itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam kasus perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh perkawinan usia muda.¹¹ Supaya tujuan perkawinan dapat terlaksana, maka kematangan calon pengantin sangat diharapkan. Kematangan di maksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebut diatas dapat terlaksana dengan baik.¹² Secara psikologis , remaja yang menikah sebelum usia psikologis yang tepat biasanya rentan menghadapi dampak buruknya. Pada saat itu remaja belum siap menghadapi tanggung jawab yang harus diemban sebagai orang

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia, Cct.1* (Jakarta: Kencana, 2006),11

Menanggapi hal tersebut maka perlu adanya batasan usia kawin, sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam hukum islam yaitu: *pertama*, mendapatkan dan melangsungkan keturunan, *kedua*, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasihsayangnya, *ketiga*, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, *Keempat*, menumbuhkan kesungguhan untuk tanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal dan *keenam*, yaitu untuk membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹³

Sedangkan tujuan perkawinan sendiri menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara menurut perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mencapai *mawaddah, dan Rahmah*.

Menanggapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan instrument hukum yang berkaitan dengan kesehatan khususnya kesehatan organ reproduksi sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 131 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan , dan sampai berusia 18 tahun untuk menjaga kesehatan repropduksi, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk pekawinan.¹⁴ Dokter spesialis kebidanan dan andungan, Ruby Irwin, menyatakan secara medis perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun sangat rentan terkena kanker leher Rahim (*serviks*).

Amad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 203

Dampak perkawinan di bawah umur lainnya adalah mudah terjebak pada pekerjaan yang berbahaya, kotor, dan sulit seperti TKW, bahkan mudah terjebak sebagai korban perdagangan manusia yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁶ Hal inilah begitu sangat disayangkan apabila ada orang melanggar Undang-undang ini. Oleh karena itu pemahaman terhadap Undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.¹⁷

¹⁷ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO)

**DESKRIPSI PERATURAN BUPATI KULONPROGO NOMOR 9
TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA
USIA ANAK**

1. Letak Geografis Kabupaten Kulonprogo

a. Keadaan Geografis

Kabupaten Kulonprogo adalah salah satu kabupaten paling barat yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten ini memiliki ibukota wates yang memiliki luas 58.675,5 ha. Kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 kecamatan yaitu Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, Dan Samigaluh. Kabupaten ini juga terdiri atas 87 desa, 1 kelurahan dan 917 padukuhan. Secara astronomi kabupaten Kuulonprogo

terletak antara $7^{\circ} 38'43''$ - $7^{\circ} 59'3''$ lintang selatan dan antara $110^{\circ}n1'37''$ - $110^{\circ}16'26''$ Bujur Timur¹.

Batas-batas kabupaten Kulonprogo adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Sleman
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Purwoerto, Jawa Tengah
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Magelang
- 4) Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia

b. Topografi

Kabupaten Kulonprogo sendiri merupakan daerah yang terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan, presentase kabupaten Kulonprogo dari permukaan air laut adalah 17,58% berada pada ketinggian <7m diatas permukaaan air laut, 15,20% berada di 26-100m di atas permukaan air laut, 22,84% berada di 26-100m diatas permukaan air laut, 33,00% berada pada ketinggian 101-500m diatas permukaan air laut dan 11,37% berada pada ketinggian >500m di atas permukaan air laut².

c. Kondisi Iklim

Pada tahun 2015 rata-rata curah hujan yang dimiliki Kabupaten Kulon progo perbulannya adalah 164mm dan hari hujan 8hh perbulan. Curah hujan ini biasanya memuncak pada bulan Desember ketika musim hujan mulai tiba³.

¹ Letak Geografis Kabupaten Kulonprogo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo

² Topografi Kabupaten Kulonprogo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo

³ Kondisi Iklim Kabupaten Kulonprogo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo

1. Latar Belakang Ditetapkannya Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Latar belakang ditetapkan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah adanya keinginan untuk membangun masadepan negara yang berarti juga membangun generasi muda, yaitu anak-anak Indonesia, yang berkualitas baik secara fisik, prilaku, maupun intelektual. Dimana untuk mewujudkan hak anak dengan *Rights Based Approach*, (Pendekatan berbasis hak). Dimana hak dasar anak adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyiksaan dan eksploitasi dan berpartisipasi secara optimal dalam lingkup keluarga, kehidupan sosial dan budaya.

Mempertimbangkan juga kondisi anak di Indonesia yang semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak (usia 0-18 tahun), lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat belum mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada anak, dampak kekerasan anak tidak hanya jangka pendek tetapi jangka panjang, dan juga anak tidak saja menjadi korban kekerasan, akan tetapi menjadi pelaku.

Kondisi yang dihadapi di Kulonprogo sendiri kenyataan tidak sesuai dengan mimpi yang didambakan anak, selain termasuk daerah yang ber-

Ditambah lagi adanya fakta bahwa masih tingginya angka kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo seperti data yang disajikan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo, sebagai berikut :

NO	JENIS KEKERASAN	2016	2017	2018
1	FISIK	19	14	9

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak untuk mencegah dan menurunkan angka diskriminasi pada anak yang ada di Kabupatenn Kulonprogo.

2. Dasar Pembentukan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Adalah Sebuah Kebijakan Yang Ditetapkan Secara Mandiri Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo (Eksekutif) Tanpa Melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo (Legislatif). Kebijakan ini ditetapkan dan diterbitkan di Wates pada tanggal 23 Maret 2016 dan Peraturan Bupati ini tercatat dalam berita daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2016 Nomor 11, ini dilakukan agar setiap orang mengetahui kebijakan ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan pada pasal 7 menyebutkan jenis dan hirarki peraturan perUndang-undangan terdiri dari atas:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi Dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- 7) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
 - 8) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Meskipun dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ini mengatur tentang pencegahan perkawinan pada usia anak tetapi pada dasar hukum yang digunakan tidak menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. Sistematika Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 adalah peraturan yang diundangkan di wates pada tanggal 23 Maret 2016, dan masuk pada berita daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2016 Nomor 11, dimana PerBup ini terdiri dari 9 Bab dan 13 pasal yang mengatur tentang pencegahan pekawinan pada usia anak. Pada Bab I berisikan ketentuan umum, Bab ke II berisikan asas dan tujuan, bab ke III berisikan upaya pencegahan pekawinan pada usia anak, Bab IV berisikan penguatan kelembagaan, Bab V berisikan upaya pendampingan dan pemberdayaan, Bab VI berisikan pengaduan, bab

Asas hukum yang berlaku pada Peraturan Bupati Kulonprogo ini adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum dimana peraturan ini mengatur lebih khusus tentang pencegahan perkawinan untuk menghindari dampak buruknya perkawinan dibawah usia 18 tahun yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulonprogo dibandingkan batas minimal usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yakni 16 tahun. Selain itu pada tahun 2017 muncul putusan MK nomor 22 PUU/XV/2017 Tentang Perkawinan dimana dalam amar putusannya MK menyatakan frasa usia 16 tahun dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasae 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pertimbangan MK, pasal tersebut tidak sinkron dengan pasal 1 Undang-undang perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- Non diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.
- Partisipasi; dan
- Pemberdayaan.

- a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. Mewujudkan keluarga yang harmonis;
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- e. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
- f. Mencegah terjadinya tindakan KDRT;
- g. Mencegah putus sekolah;
- h. Menurunkan angka kemiskinan; dan
- i. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Adanya pencegahan perkawinan dibawah usia 18 tahun ini juga bagian dari merespon himbauan dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengacu pada pembahasan terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan BKKBN dalam Program KB-nya yang menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas⁹.

Di dalam program PUP ada terkait dengan Perencanaan Keluarga, dimana Perencanaan Keluarga menjadi kerangka program PUP yang terdiri dari 3 (tiga) masa reproduksi, yaitu masa menunda perkawinan dan kehamilan, masa menjarangkan kehamilan dan masa mencegah kehamilan. Jadi, adanya pencegahan perkawinan pada usia anak dibawah 18 tahun termasuk juga bagian dari respon program PUP Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Peran Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang dulu dikenal dengan istilah pengembangan masyarakat (*Community Development*) atau pembangunan masyarakat (*Rural Development*). Secara konseptual program ini sejalan dengan tipe program developmental yang sasarannya adalah pemberian bantuan pemecahan masalah. Target keluarannya adalah meingkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi permasalahan kehidupan¹⁰.

Sebagai realisasi terhadap Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan

Adapun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) adalah sebagai berikut¹¹ :

Dimana tugas dan Fungsi kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Menyelenggarakan fungsi yaitu : perumusan kebijakan teknis

¹¹ *Ibid*

Dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Kulonprogo, maka Perbub tersebut diharapkan untuk bisa terlaksana secara keseluruhan sehingga bisa menurunkan banyaknya masalah tingginya perkawinan pada usia anak di Kabupaten Kulonprogo dan supaya juga masalahnya bisa teratasi¹².

¹² Tujuan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Kabupaten Kulonprogo menerbitkann Perbup ini agar pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak di kabupaten kulonprogo semakin maksimal.

Setelah ditetapkan peraturan bupati kulonprogo. Maka ada usaha usaha lanjutan yang dilakukan untuk adanya pelaksanaan Perbup ini kepada masyarakat, seperti yang dipaparkan oleh bapak Mardiya usaha yang dilakukan adalah :

“...kami melakukan sosialisasi secara berkala di 12 kecamatan yang ada di kabupaten Kulonprogo, dan melakukan sosialisasi serta kerjasama juga dengan sekolah, LSM, Babin Kantipnas, dan generasi muda, dan itu kami bikin surat penandatanganan komitmen untuk turut serta dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dibawah 18 tahun, dan juga kami ada sosialisasi pencegahan melalui sosial media dengan kita bikin lagu-lagu yang kita sebar melalui CD dan di youtube”¹³

Pencegahan dan upaya yang dilakukan ini terbagi dalam beberapa macam jenis. Ada yang bersifat edukatif untuk memberikan pemahaman tentang kerugian pernikahan pada usia anak, ada juga yang bersifat memaksimalkan peran masyarakat dalam melaksanakan pengaduan yang akan ditindak lanjuti oleh beberapa lembaga yang melibatkan psikolog, konselor, akademisi, praktisi hukum dan lain sebagainya untuk melaksanakan pencegahan perkawinan pada usia anak,. Ditegaskan juga bahwa pelaksanaan dalam PerBup Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 bahwa

pengecegan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orangtua, anak, masyarakat, dan pemangku kepentingan¹⁴.

Adapun secara jelas peran penting lainnya terkait kegiatan yang dilakukan atas adanya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah sebagai berikut :

1) Pemerintah Daerah

Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Kulonprogo termasuk yang Merumuskan kebijakan. Dengan mengsinergikan kebijakan mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan mengedepankan kepentingan anak dengan semaksimal mungkin pemerintah berupaya melakukan pengaturan-pengaturan yang bisa menghasilkan pemenuhan hak anak secara baik di Kulonprogo¹⁵.

2) Orang Tua

Upaya juga dilakukan sosialisasi terhadap orang tua agar memberikan pendidikan keagamaan, memberikan Pendidikan karakter, dan Penanaman nilai budi pekerti dan budaya, serta memberikan Pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak-anak mereka sejak dini¹⁶.

¹⁴ Bab III Pasal 3, Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

15 Catatan Materi Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Lembaga DP3AP2KB

¹⁶ *Ibid*

3) Masyarakat & pemangku kepentingan

Kegiatan lainnya terkait adanya Perbub Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dimana melibatkan psikologi anak, konselor, ormas, akademisi dan pemerhati anak untuk ikut memberi sosialisasi dan edukasi kepada anak akan pentingnya pendidikan, memberi masukan dalam Perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulonprogo, ikut berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dan dapat menyelenggarakan MOU dan atau deklarasi pencegahan diskriminasi dan pencegahan perkawinan pada usia anak¹⁷.

4) Anak

Dan pemerintah daerah Kabupten Kulonprogo juga mengajak anak-anak untuk mengamalkan ibadah sesuai dengan ajaran agama, Cintai keluarga, masyarakat dan sayangi teman, mencintai tanah air bangsa dan negara Indonesia, untuk wajib belajar 12 tahun, dan turut sejak dini berpartisipasi dalam pembangunan¹⁸.

¹⁷ *Ibid*

18 *Ibid*

BAB IV

**BATAS USIA PERKAWINAN PADA ANAK DALAM PERATURAN
BUPATI KULONPROGO NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DALAM
PRESPEKTIF YURIDIS**

A. Pengaturan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada usia Anak

1. Batas usia pencegahan perkawinan pada usia anak dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016

Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016, pada pasal 1 ayat (6) bahwa yang disebut dengan pencegahan perkawinan pada usia anak adalah : Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Pemerintah Daerah.

Sementara yang disebut dengan perkawinan anak adalah dijelaskan pada pasal 1 ayat (7) yaitu Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 tahun. Jadi batas usia pencegahan perkawinan

Pecegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Alasan utama adanya Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah Kabupaten Kulonprogomenghadapi tingginya perkawinan usia anak¹, dimana tercatat pada tahun 2014 ada sebanyak 50 perkawinan , pada tahun 2015 sebanyak 46 perkawinan, pada tahun 2016 sebanyak 43 perkawinan, dan pada tahun 2017 sebanyak 36 perkawinan². Data lain menunjukkan juga masih banyak diskriminasi pada anak yang ada di Kulonprogo yaitu: Masih ada anak dengan gizi buruk pada tahun 2014 sebanyak 35 anak, pada tahun 2015 sebanyak 15 anak,dan pada tahun 2016 sebanyak 29 anak, Masih ada anak korban kekerasan pada tahun 2015 sebanyak 59 anak, tahun 2016 sebanyak 65 anak, 2017 sebanyak 66 Anak, dan pada tahun 2018 sebanyak 62 anak, Masih ada anak tidak sekolah atau putus sekolah pada tahun 2014 sebanyak 242 anak, dan pada tahun 2016 sebanyak110 anak, Masih ada kasus anak berhadapan dengan hukum pada tahun 2016 sebanyak 47 anak, tahun 2017 sebanyak 55 anak,dan pada tahun 2018 sebanyak 53 anak, Anak jalanan pada tahun 2016 sebanyak 21 anak, tahun 2017 sebanyak 44 anak, Masih ada pernikahan usia dini pada tahun 2014 sebanyak 53, tahun 2015 sebanyak35,

² Data Dinas Sosial Kulonprogo. www.Kulonprogopkab.Go.Id

3. Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak pada Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016

³ Data Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo

Selain itu kalau melihat tujuan dari Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 adalah bagian dari terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan BKKBN dalam Program KB-nya yang menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas⁶.

Sebagai pemegang kunci pokok tugas pelaksanaan dalam pencegahan perkawinan usia anak, pemerintah daerah Kulonprogo memiliki peran-peran vital dalam melaksanakan PerBup ini. Dimana pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

⁵ Pasal 1 Ayat (2), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Aksi pencegahan perkawinan pada usia anak pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo tidak hanya setelah Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 ini terbit. Ini dibuktikan dengan adanya Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Kabupaten Layak Anak (KLA), yang dibentuk lebih dahulu dibandingkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Jadi, adanya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah bentuk penegasan dari cita-cita Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk menjadikan Kulonprogo sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) yakni daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang

terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak⁷.

Setelah adanya peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 ini juga banyak program yang dilakukan salah satunya adalah dengan membuat kegiatan deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan ke lembaga lembaga, masyarakat, dan ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kulonprogo⁸. sekaligus untuk bersinergi bersama masyarakat, orangtua, dan pemangku kepentingan agar ikut terlibat melaksanakan amanat yang ada didalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 yaitu :

"Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Pemerintah Daerah"⁹

Pengaturan lainnya pencegahan perkawinan pada usia anak dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 tahun 2016 disebutkan pada pasal 10 bahwa Pengaduan pada ayat (1) berbunyi setiap orang melihat, mengetahui, dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan pada ayat (2) berbunyi setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan

⁷ Pasal 1 Ayat (21) Ketentuan Umum, Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

⁸ Mardiya, *Wawancara*, Yogyakarta 2 April 2019

⁹ Pasal 1 Ayat (6), Ketentuan Umum, Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

ada¹¹.

Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi, pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan dini dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai fungsi dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak¹².

Dalam pelaksanaan pencegahannya untuk pemantauan dan evaluasi pemerintah kabupaten Kulonprogo juga membuat sistem pemantauan dan evaluasi seperti apa yang ada pada Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak¹².

Dalam pelaksanaan pencegahannya untuk pemantauan pemerintah kabupaten Kulonprogo juga membuat sistem seperti apa yang ada pada Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi yang terpadu¹³.

¹¹ *Ibid*, Pasal 10 Ayat (3)

¹³ *Ibid*, Pasal 11 Ayat (2)

Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia menyatakan bahwa Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 tahun.¹⁵ Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan pada pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur ini juga seperti

¹⁵ Pasal 1 Ayat (7), Ketentuan Umum, Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Ada perbedaan batas minimal batas usia perkawinan, dimana dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 menyebut pencegahan perkawinan dilakukan untuk anak dibawah usia 18 tahun, namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun untuk Laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, sedangkan dibawah umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Kalau dilihat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan pada pasal 7 menyebutkan jenis dan hirarki peraturan perUndang-undangan terdiri dari atas:

dan umum Peraturan B
ah proses, cara, perbu
a anak.

Asas hukumnya, yang berlaku pada Peraturan
 un 2016 ini adalah asas *lex specialis derogat*
 lebih khusus akan mengesampingkan peraturan
 batas minimal usia perkawinan yang ditentukan

Selain itu, PerBup Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ini hanya dibuat untuk satu materi tertentu saja yakni mengatur mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak, sedangkan KHI dan UUP mengatur seluruh aspek sendi-sendi di dalam perkawinan sehingga

Pada tahun 2017 muncul putusan MK nomor 22 PUU/XV/2017 Tentang Perkawinan dimana dalam amar putusannya MK menyatakan frasa usia 16 tahun dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasae 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pertimbangan MK, pasal tersebut tidak sinkron dengan pasal 1 Undang-undang perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 sudah sejalan dengan putusan MK tersebut.

“Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.”

Diperjelas dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 bahwa “Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Pemerintah Daerah”. Menunjukkan peraturan bupati ini tidak ada ancaman pidana karena hanya bersifat himbauan saja apalagi tidak ada unsur bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Seperti apa yang dipaparkan diatas bahwa adanya Peraturan Bupati ini memang sebagai upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi angka

arakat, dan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang terserap di Kabupaten Kulonprogo. Oleh sebab itu untuk mempermudah, memajukan, efektifitas, dan tenaga SDM yang mumpuni, pemerintah Kabupaten Kulonprogo menerbitkann PerBup ini agar pencegahan, perlindungan, pemberdayaan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulonprogo semakin maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mendapatkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Akibat tingginya perkawinan usia anak dibawah usia 18 tahun di Kabupaten Kulonpogo dan dalam salah satu cita-cita Kabupaten Kulonprogo yang ingin mewujudkan pemenuhan hak-hak anak yang layak dan menjadikan Kulonprogo sebagai Kabupaten Layak Anak maka dibentuklah Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak untuk mencegah dan menurunkan angka diskriminasi pada anak di Kabupaten Kulonprogo.

Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Pencegahan dan upaya yang dilakukan terbagi dalam beberapa macam jenis. Ada yang bersifat edukatif untuk memberikan pemahaman tentang kerugian pernikahan pada usia anak, ada juga yang bersifat memaksimalkan peran masyarakat dalam melaksanakan pengaduan yang akan ditindak lanjuti oleh beberapa lembaga yang terkait.

- Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2017 memiliki implikasi hukum dan hanya bersifat sebagai Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2017 mengatur materi tertentu saja yakni mengatur mengenai perkawinan, sedangkan KHI dan UUP mengatur seluruh aspek perkawinan sehingga cakupan yang diatur dalam KHI dan UUP lebih luas daripada Peraturan bupati ini memberikan pengaruh yang signifikan pada sosiologis sedangkan pengaturan dalam KHI dan UUP lebih banyak implikasi yuridis bagi masyarakat.

ya untuk penutup skripsi ini peneliti memberikan
at dalam pencegahan perkawinan pada usia anak :

at dalam pencegahan perkawinan pada usia anak :

- erintah Kabupaten Kulonprogo Perlunya sosialisasi
secara terus menerus untuk mencapai hasil yang l
apapun cita-cita yang ingin dicapai jika program y
asyarakat yang tidak tau maka akan sia-sia.
g yang akan menikah, hendaknya lebih mempert
a maupun jasmani dan rohani. Sebelum me

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi , Abu, Chalid Nabukodan, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Ahmadi, Abu dkk,*Psikologi Sosial*, Cet Ke-2, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, *Reskontruksi Keadilan*, Salatiga: STAIN SALATIGA PRESS, 2007.
- Catatan Materi Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, lembaga DP3AP2KB.
- Data Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo.
- Data Dinas Sosial Kulonprogo. www.kulonprogopkab.go.id.
- Demografi Kabupaten Kabupaten Kulonprogo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo.
- Ghazali, Abd. Rahmad, *Fiqh Munakahat*, Cet.1, Bogor: Kencana, 2003.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Anak*, Cet.Ke-2, Bandung: P.T. Refika Aditama,2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Huraerah, Abu, *Chile Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2007.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*,Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika,2013), 203.
- Konvensi Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak, Volume III Nomor 3 Tahun1999, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan.
- Kopilasi Hukum Islam, Cet. Ke-6, Bandung: CV. Nuansa Auliya, 2015.

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, cet. Ke-5, Bandung: Citra Umbara, 2015.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun
2014.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wawancara

Mardiya, *wawancara*, Yogyakarta, 2 April 2019